

**IMPLEMENTASI PERBUB NO.72 TAHUN 2018 TENTANG  
SISTEM PENGELOLAAN LALU LINTAS RAMBU RAMBU  
JALAN ANGKUTAN DARAT (SIPALUI RAJA ADAT) DI  
KAWASAN *ONE WAY TRAFFIC* KECAMATAN AMUNTAI  
TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA**

**(Studi Kasus Jalan Abdul Aziz dan Jalan Antasari)**

**PROPOSAL SKRIPSI**

Diajukan sebagai Salah Satu Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana (S1)

pada Program Studi Ilmu Administrasi Publik



**OLEH :**

**MUHAMMAD SHAUFI**

**NPM: 20.22.199**

**SEKOLAH TINGGI ILMU ADMINITRASI (STIA)  
AMUNT**

## TANDA PERSETUJUAN

Menerangkan Mahasiswa di bawah ini atas nama:

Nama : MUHAMMAD SHAUFI

NPM : 2022199

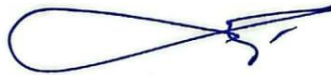
Program Studi : S1 Administrasi Publik

Judul Skripsi : **"IMPLEMENTASI PERBUB NO.72 TAHUN 2018  
TENTANG SISTEM PENGELOLAAN LALU LINTAS  
RAMBU RAMBU JALAN ANGKUTAN DARAT (SIPALUI  
RAJA ADAT) DI KAWASAN ONE WAY TRAFFIC  
KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN  
HULU SUNGAI UTARA(Studi Kasus Jalan Abdul Aziz dan  
Jalan Antasari)"**

Setelah diseminarkan dan diadakan perbaikan seperlunya kami dapat  
menyetujui proposal skripsi atas nama di atas untuk dilanjutkan ke pembimbingan  
Skripsi pada Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu  
Administrasi (STIA) Amuntai

Amuntai, April 2026

Pembimbing 1



**Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos., M.AP**  
NUPTK. 4142764665137003

Pembimbing 2



**Haris Fadillah, S.Sos, M.A.B, CLMA**  
NUPTK. 199406092015091020



Mengetahui,  
Ketua Program Studi Administrasi Publik

**Ahmad Baihaqi, S.Sos, M.A**  
NIK. 19921104 2015091 021

## KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas segala limpahan rahmat, taufik, dan hidayah-nya sehingga penulis dapat menyelesaikan proposal skripsi yang berjudul “IMPLEMENTASI PERBUB NO.72 TAHUN 2018 TENTANG SISTEM PENGELOLAAN LALU LINTAS RAMBU RAMBU JALAN ANGKUTAN DARAT (SIPALUI RAJA ADAT) DI KAWASAN *ONE WAY TRAFFIC* KECAMATAN AMUNTAI TENGAH KABUPATEN HULU SUNGAI UTARA (Studi Kasus Jalan Abdul Aziz dan Jalan Antasari) “.Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana pada Program Studi Administrasi Publik.

Penulisan proposal ini tidak terlepas pada bantuan, dukungan, dan bimbingan berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis menyampaikan terima kasih sebesar-besarnya kepada :

1. Bapak Dr. Reno Affrian, S.Sos., M.AP., CIQaR., CIQnR Ketua Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi (STIA) Amuntai.
2. Bapak Dr. Agus Surya Dharma, S.Sos M.A.P selaku Dosen Pembimbing 1 yang telah memberikan arahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan proposal skripsi ini.
3. Bapak Haris Fadillah, S.Sos, M.AB. CLMA selaku Dosen Pembimbing 2 yang telah memberikan arahahan, bimbingan, dan motivasi dalam penyusunan proposal skripsi ini.
4. Kedua orang tua, keluarga tercinta, dan teman-teman seperjuangan yang selalu memberikan doa, dukungan, semangat, dan bantuan dalam proses penyusunan proposal skripsi ini.

Penulis menyadari bahwa proposal skripsi ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu penulis sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun demi perbaikan di masa yang akan datang. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi pengembangan ilmu Administrasi Publik, khususnya dalam bidang implementasi kebijakan publik di sektor transportasi.

Akhir kata, penulis berharap semoga karya ini dapat memberikan kontribusi positif bagi pembaca dan pihak-pihak yang berkepentingan.

Amuntai, Februari 2026

Penulis

## DAFTAR ISI

|                                        |           |
|----------------------------------------|-----------|
| HALAMAN JUDUL.....                     | i         |
| KATA PENGANTAR .....                   | iii       |
| DAFTAR ISI.....                        | v         |
| DAFTAR TABEL .....                     | vi        |
| DAFTAR GAMBAR .....                    | vii       |
| <b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>          | <b>1</b>  |
| A. Latar Belakang .....                | 1         |
| B. Fokus Penelitian .....              | 1         |
| C. Rumusan Masalah .....               | 4         |
| D. Tujuan Penelitian .....             | 4         |
| E. Manfaat Penelitian .....            | 4         |
| <b>BAB II LANDASAN TEORI .....</b>     | <b>7</b>  |
| A. Hasil Penelitian Terdahulu .....    | 7         |
| B. Tinjauan Teoritis .....             | 9         |
| C. Kerangka Pemikiran.....             | 17        |
| <b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b> | <b>21</b> |
| A. Lokasi Penelitian.....              | 21        |
| B. Pendekatan Penelitian .....         | 21        |
| C. Tipe Penelitian .....               | 22        |
| D. Data dan Sumber Data .....          | 23        |
| E. Desain Operasional Penelitian ..... | 23        |
| F. Teknik Pengumpulan Data .....       | 27        |
| G. Teknik Analisa Data.....            | 27        |
| H. Uji Kredibilitas.....               | 28        |
| <b>DAFTAR PUSTAKA .....</b>            | <b>31</b> |

## DAFTAR TABEL

|                |    |
|----------------|----|
| Tabel 3.1..... | 25 |
| Tabel 3.2..... | 26 |

## DAFTAR GAMBAR

|                 |    |
|-----------------|----|
| Gambaf 2.1..... | 20 |
|-----------------|----|

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Transportasi merupakan salah satu aspek penting dalam mendukung aktivitas masyarakat, khususnya di wilayah perkotaan. Meningkatnya jumlah kendaraan dari waktu ke waktu berdampak pada meningkatnya permasalahan lalu lintas, seperti kemacetan, pelanggaran aturan, serta rendahnya tingkat keselamatan pengguna jalan. Oleh karena itu, diperlukan suatu kebijakan yang mampu mengatur dan mengelola lalu lintas secara efektif guna menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan berlalu lintas.

Pemerintah daerah memiliki peran strategis dalam mengatur sistem lalu lintas melalui kebijakan yang sesuai dengan kondisi daerah. Salah satu bentuk kebijakan tersebut adalah Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu-Rambu Jalan Angkutan Darat (SIPALUI RAJA ADAT). Kebijakan ini bertujuan untuk mengatur penggunaan jaringan jalan, termasuk penerapan di kawasan satu arah (*one way traffic*) pada ruas jalan tertentu guna mengurangi kepadatan dan meningkatkan kelancaran arus lalu lintas.

Sistem *one way traffic* merupakan salah satu bentuk rekayasa lalu lintas yang diterapkan untuk mengoptimalkan kapasitas jalan dengan mengatur arah pergerakan kendaraan menjadi satu arah. Penerapan sistem ini diharapkan mampu mengurangi konflik lalu lintas, memperlancar arus kendaraan, serta meningkatkan keselamatan pengguna jalan. Di Kabupaten

Hulu Sungai Utara, sistem ini telah diterapkan pada beberapa ruas jalan, di antaranya Jalan Antasari dan Jalan Abdul Aziz Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Namun, dalam pelaksanaannya, implementasi Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat (SIPALUI RAJA ADAT) Di Kawasan *One Way Traffic* Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara terkait sistem pengelolaan lalu lintas, khususnya pada kawasan *one way traffic* di Jalan Abdul Aziz dan Jalan Antasari belum sepenuhnya berjalan sesuai dengan yang diharapkan.

Pengelolaan lalu lintas rambu rambu jalan angkutan darat di kawasan *one way traffic* di Jalan Abdul Aziz dan Jalan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten HSU masih menunjukkan beberapa permasalahan di lapangan. Berdasarkan hasil observasi di ruas Jalan Abdul Aziz terlihat pada kondisi rambu lalu lintas yang sudah dan tidak terawat dengan baik. Hal ini dapat meningkatkan resiko terhadap pelanggaran rambu bagi pengguna jalan. Fenomena ini menunjukkan bahwa aspek pemeliharaan sebagai bagian dari fungsi manajemen publik belum berjalan secara efektif. Permasalahan lainnya yang terlihat di ruas jalan Antasari, kelengkapan rambu lalu lintas dalam mendukung kelancaran arus lalu lintas di sepanjang ruas jalan tersebut masih belum memadai kondisi ini menunjukkan adanya keterbatasan dalam aspek perencanaan dan penyediaan fasilitas, sehingga informasi lalu lintas yang seharusnya jadi panduan bagi masyarakat secara maksimal. Selain itu sistem pengawasan di ruas jalan tersebut masih kurang optimal hal ini

terlihat dari masih adanya masyarakat yang memarkirkan kendaraannya di bahu jalan sehingga menghambat lalu lintas terutama di waktu waktu tertentu kondisi tersebut mencerminkan belum optimalnya koordinasi antar instansi pelaksana kebijakan serta kurangnya pengawasan dalam memastikan standar pelayanan publik terpenuhi.

Berdasarkan uraian di atas, penulis tertarik untuk melakukan penelitian dengan judul “Implementasi Perbub No. 72 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat (SIPALUI RAJA ADAT) di Kawasan *One Way Traffic* Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Jalan Antasari dan Jalan Abdul Aziz Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara.”

## **B. Fokus Penelitian**

Agar penelitian ini lebih terarah dan tidak melebar, maka fokus penelitian ini adalah Implementasi Perbub No. 72 Tahun 2018 tentang sistem pengelolaan lalu lintas rambu rambu jalan angkutan darat (SIPALUI RAJA ADAT) di kawasan *one way traffic* kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Maka Fokus penelitian ini dianalisis menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edward III (dalam Widodo 2018), yang meliputi empat indikator utama, yaitu:

1. Komunikasi (*Communication*)
2. Sumber Daya (*Resources*)
3. Disposisi (*Disposition/Attitude*)
4. Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

### **C. Rumusan Masalah**

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana implementasi Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2018 tentang system pengelolaan lalu lintas rambu rambu jalan angkutan darat (SIPALUI RAJA ADAT) di kawasan *one way traffic* Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi kasus di jalan Abdul Aziz dan Antasari)?
2. Faktor-faktor apa saja yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2018 tentang sistem pengelolaan lalu lintas rambu rambu jalan angkutan darat (SIPALUI RAJA ADAT) di kawasan *one way traffic* kecamatan Amuntai Tengah kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Jalan Abdul Aziz dan Jalan Antasari)?

### **D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis implementasi Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2018 tentang sitem pengelolaan lalu lintas rambu rambu jalan angkutan darat (SIPALUI RAJA ADAT) di kawasan *one way traffic*

Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus di Jalan Antasari dan Jalan Abdul Aziz).

2. Untuk mengetahui faktor-faktor yang mempengaruhi implementasi Peraturan Bupati No. 72 Tahun 2018 Tentang Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat di Kawasan *One Way Traffic* Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara (Studi Kasus Jalan Abdul Aziz dan Jalan Antasari).

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Secara teoritis penelitian ini di harapkan dapat memberikan kontribusi dalam pengembangan ilmu administrasi publik, khususnya dalam kajian implementasi kebijakan publik ditingkat pemerintahan daerah. Hasil penelitian ini dapat memperkaya referensi akademik mengenai penerapan teori implementasi kebijakan, khususnya model George C. Edwards III, dalam konteks kebijakan pengelolaan lalu lintas rambu-rambu jalan angkutan darat (sipalui raja adat) di kawasan perkotaan.

2. Manfaat Praktis

Secara praktis Dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan saran dan masukan guna mengambil langkah yang tepat dalam rangka meningkatkan kualitas tata kelola lalu lintas dan rambu rambu jalan di tingkat kota dan juga dan juga dapat menjadi bahan evaluasi dalam upaya mendukung Implementasi Perbub No 72. Tahun 2018 Tentang Sitem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat di Kawasan Perkotaan. Memberikan gambaran nyata mengenai faktor

pendukung dan penghambat implementasi kebijakan sehingga dapat dijadikan dasar pengambilan keputusan dan penyusunan kebijakan.

## BAB II

### LANDASAN TEORI

#### A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Penelitian yang dilakukan oleh Putra, Yuliani, dan As'ari (2022) dalam *Jurnal Niara* yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan (Studi Kasus Penyediaan Perlengkapan Umum yang Berstatus Sebagai Jalan Kota di Kecamatan Pekanbaru Kota )”**. Berfokus pada tujuan dari Peraturan Daerah yaitu untuk mewujudkan lalu lintas dan angkutan jalan di kota pekanbaru aman, lancar, dan teratur nyaman dan efisien yang belum tercapai. Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan Grindle yang isi kebijakannya mencakup: Kepentingan kelompok, Jenis manfaat, Perubahan yang ingin dicapai, Letak pengambilan keputusan, Pelaksanaan program, dan Sumber daya yang digunakan..Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa Implementasi kebijakan penyediaan perlengkapan jalan belum optimal karena keterbatasan sumber daya dan belum tercapainya tujuan keselamatan serta kenyamanan lalu lintas.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada:

- a) Fokus kajian yang sama-sama membahas implementasi kebijakan di bidang lalu lintas, khususnya yang berkaitan dengan pengelolaan perlengkapan jalan seperti rambu lalu lintas.

- b) Penelitian ini juga menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif untuk menggambarkan kondisi nyata di lapangan.

Adapun perbedaan dengan penelitian ini terletak pada:

- a) Penelitian ini menggunakan aspek penelitian melalui Implementasi perbub No. 72 Tahun 2018 SIPALUI RAJA ADAT yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya.
- b) Penelitian ini juga menggunakan model implementasi kebijakan George C. Edward III sebagai alat analisis utama. Berbeda dengan penelitian sebelumnya yang menggunakan model dari Grindle.

2. Penelitian yang dilakukan oleh Indriani dan Habibie (2025), dalam *journal of social science and education (IJOSSE)* yang berjudul **“Implementasi Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas: Studi Kasus Sistem Satu Arah Dan U-Turn Di Kota Pekanbaru”**. Berfokus pada implementasi kebijakan rekayasa lalu lintas (*one way dan u-turn*) Penelitian ini menggunakan tipe dan jenis penelitian Kualitatif deskriptif. Teori yang digunakan pada penelitian ini adalah teori Implementasi kebijakan George C. Edward III yang terdiri dari komunikasi, sumber daya, disposisi dan struktur birokrasi. Hasil penelitian ini menunjukkan Implementasi rekayasa lalu lintas (*one way dan U-turn*) di Kota Pekanbaru belum berjalan optimal, Masih ditemukan pelanggaran oleh pengguna jalan, terutama pada area U-turn kemudian Faktor penghambat meliputi kurangnya sosialisasi kepada masyarakat, keterbatasan rambu dan marka jalan, serta pengawasan yang belum maksimal, dan Koordinasi antar instansi

terkait masih perlu ditingkatkan untuk mendukung efektivitas kebijakan.

Persamaan dalam penelitian ini terletak pada:

- a) Sama-sama membahas implementasi kebijakan dalam pengelolaan lalu lintas rambu rambu jalan di kawasan *one way traffic*. Dan Sama-sama menggunakan teori Edward III sebagai landasan analisis.
- b) Penelitian ini juga sama-sama menyoroti permasalahan saran dan prasarana seperti rambu lalu lintas.

Adapun Perbedaan terletak pada:

- a) Ruang lingkup penelitian , dimana penelitian tersebut mencakup sistem satu arah dan U-turn, sedangkan penelitian ini hanya berfokus pada kawasan *one way traffic*.
- b) Penelitian ini menggunakan aspek penelitian melalui Implementasi perbub No. 72 Tahun 2018 SIPALUI RAJA ADAT yang menjadi pembeda antara penelitian sebelumnya.

## **B. Tinjauan Teoritis**

### **1. Kebijakan Publik**

Kebijakan publik merupakan salah satu kajian utama dalam ilmu administrasi publik yang berkaitan dengan tindakan pemerintah dalam mengatasi berbagai permasalahan masyarakat. Kebijakan publik menjadi instrumen penting dalam mewujudkan tujuan pembangunan serta memberikan pelayanan kepada masyarakat secara efektif dan efisien.

Menurut Howlet (2018), implementasi kebijakan berkaitan dengan aturan implementasi yang dipahami sebagai sebuah transformasi tujuan kebijakan menjadi tindakan dan kegiatan pada level pemerintah yang lebih rendah seperti halnya sebagai pelaksana. Implementasi kebijakan merupakan bagian dari proses kebijakan publik yang menerjemahkan niat pemerintah kedalam tindakan dan kegiatan untuk mewujudkan tujuan kebijakan.

Menurut Budi Winarno (2016), kebijakan publik adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh pemerintah untuk mencapai tujuan tertentu dalam mengatasi permasalahan yang dihadapi masyarakat. Winarno menjelaskan

Sementara itu, Thomas R. Dye (2017) menyatakan bahwa kebijakan publik adalah segala sesuatu yang dipilih pemerintah untuk dilakukan atau tidak dilakukan (*whatever government chooses to do or not to do*).

Riant Nugroho (2017) menjelaskan bahwa kebijakan publik merupakan keputusan strategis yang dibuat oleh pemerintah untuk menyelesaikan permasalahan publik, yang kemudian diimplementasikan melalui program dan kegiatan nyata. Kebijakan publik juga mencerminkan respon pemerintah terhadap kebutuhan masyarakat yang bersifat dinamis.

Berdasarkan dari teori di atas bahwa kebijakan publik dapat dipahami sebagai suatu proses dinamis yang melibatkan berbagai tahapan dan aktor dalam upaya menyelesaikan masalah publik secara terarah dan berkelanjutan.

## 2. Tahapan Kebijakan Publik

Menurut Riant Nugroho (2017), kebijakan publik melalui beberapa tahapan, yaitu:

- a. Perumusan Masalah, Identifikasi masalah publik yang memerlukan intervensi pemerintah.
- b. Agenda Kebijakan, Masalah yang telah diidentifikasi kemudian masuk dalam prioritas pemerintah
- c. Formulasi Kebijakan, Penyusunan alternatif solusi atau rancangan kebijakan.
- d. Legitimasi Kebijakan, Pengesahan menjadi pengaturan resmi.
- e. Implementasi Kebijakan, pelaksanaan kebijakan oleh instansi pelaksana.
- f. Evaluasi Kebijakan, penilaian terhadap keberhasilan atau kegagalan kebijakan.

Menurut Howlet dan ramesh (2018) tahapan kebijakan publik meliputi:

- a. *Agenda setting*, penentuan isu yang menjadi perhatian pemerintah.
- b. *Policy formulation*, penyusunan alternatif kebijakan.
- c. *Decision making*, pengambilan keputusan kebijakan.
- d. *Policy implementation*, pelaksanaan kebijakan.
- e. *Policy evaluation*, penilaian terhadap kebijakan.

Menurut Budi Winarno (2016), tahapan kebijakan publik meliputi:

- a. Perumusan masalah, mengidentifikasi masalah publik.
- b. Perumusan kebijakan m enyusun alternatif kebijakan.
- c. Penetapan kebijakan, memilih kebijakan yang akan ditetapkan.
- d. Implementasi kebijakan, pelaksanaan kebijakan.
- e. Evaluasi kebijakan, menilai hasil kebijakan.

Berdasarkan pendapat para ahli tersebut, dapat disimpulkan bahwa kebijakan publik pada umumnya meliputi proses identifikasi masalah, perumusan kebijakan, pengambilan keputusan, implementasi, dan evaluasi.

### **3. Implementasi Kebijakan Publik**

Implementasi kebijakan publik merupakan tahap penting dalam proses kebijakan yang menentukan apakah suatu kebijakan dapat berjalan sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Menurut Winarno (2016), implementasi kebijakan adalah proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai aktor, organisasi, prosedur, dan teknik yang bekerja bersama untuk mencapai tujuan kebijakan.

Menurut Nugroho (2017), implementasi kebijakan merupakan upaya sistematis untuk merealisasikan kebijakan melalui program dan kegiatan yang dilakukan oleh aparat pelaksana. Keberhasilan implementasi sangat ditentukan oleh kemampuan pelaksana dalam mengelola sumber daya dan menjalin komunikasi yang efektif.

Selanjutnya, menurut Subarsono (2019), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh faktor lingkungan, baik sosial, ekonomi, maupun politik, yang dapat mendukung atau menghambat pelaksanaan kebijakan di lapangan.

Jadi berdasarkan teori para ahli di atas dapat disimpulkan bahwa implementasi kebijakan publik merupakan proses pelaksanaan kebijakan yang melibatkan berbagai faktor dan aktor dalam rangka mencapai tujuan yang telah ditetapkan.

#### **4. Peraturan Bupati Dalam Kebijakan Publik**

Peraturan Bupati (Perbub) merupakan salah satu bentuk kebijakan publik di tingkat daerah yang berfungsi sebagai pedoman pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Menurut Nugroho (2017), kebijakan publik di tingkat daerah memiliki peran strategis dalam menjawab permasalahan lokal secara spesifik.

Menurut Wahab (2018), kebijakan daerah seperti Perbub merupakan instrumen administratif yang digunakan pemerintah daerah untuk mengatur pelaksanaan kebijakan secara teknis di lapangan.

Selain itu Asshiddiqie (2017), peraturan kepala daerah termasuk dalam kategori peraturan pelaksana yang berfungsi untuk menjabarkan lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi agar dapat dilaksanakan secara teknis di lapangan.

Dengan demikian, Peraturan Bupati dapat dipahami sebagai peraturan yang ditetapkan oleh bupati untuk mengatur pelaksanaan kebijakan daerah secara lebih teknis dan operasional dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kepada masyarakat.

Dalam konteks penelitian ini, Perbub No. 72 Tahun 2018 menjadi dasar hukum dalam pengelolaan lalu lintas, khususnya terkait rambu-rambu jalan dan sistem pengaturan lalu lintas di Kabupaten Hulu Sungai Utara. Dengan demikian, Peraturan Bupati merupakan bentuk kebijakan operasional yang sangat menentukan keberhasilan implementasi di tingkat lokal.

## 5. Sistem Pengelolaan Rambu-Rambu Lalu lintas

Rambu lalu lintas merupakan bagian penting dari sistem transportasi jalan yang berfungsi sebagai alat komunikasi antara pemerintah dan pengguna jalan. Menurut Miro (2018), rambu lalu lintas adalah perangkat yang memberikan informasi, peringatan, larangan, dan perintah kepada pengguna jalan.

Menurut Tamin (2016), pengelolaan rambu lalu lintas meliputi perencanaan, pemasangan, pemeliharaan, dan evaluasi agar rambu dapat berfungsi secara optimal dalam mengatur lalu lintas.

Selanjutnya, menurut Warpani (2017), rambu lalu lintas yang tidak jelas atau tidak memadai dapat menyebabkan kebingungan bagi pengguna jalan dan berpotensi menimbulkan pelanggaran serta kecelakaan. Dengan demikian, sistem pengelolaan rambu lalu lintas merupakan faktor penting dalam mendukung keberhasilan kebijakan lalu lintas, termasuk sistem *one way traffic*

Berdasarkan teori di atas dapat disimpulkan bahwa sistem pengelolaan rambu-rambu lalu lintas merupakan bagian penting dari manajemen lalu lintas yang bertujuan untuk mengatur, mengarahkan, serta memberikan informasi kepada pengguna jalan guna menciptakan kelancaran, ketertiban, dan keselamatan lalu lintas.

## 6. Manajemen Lalu Lintas dan Angkutan Jalan

Pengelolaan lalu lintas merupakan bagian dari sistem transportasi yang bertujuan menciptakan kelancaran, keselamatan, dan ketertiban pengguna jalan. Dalam konteks administrasi publik,

pengelolaan lalu lintas merupakan bentuk pelayanan publik yang menjadi tanggung jawab pemerintah daerah.

Menurut Agustino (2020), kebijakan sektor transportasi memerlukan koordinasi lintas sektor dan dukungan infrastruktur yang memadai agar dapat berjalan efektif. Pengaturan rambu, jalur, kendaraan, dan fasilitas parkir merupakan instrumen teknis yang mendukung implementasi kebijakan lalu lintas.

Menurut Warpani (2017), manajemen lalu lintas adalah serangkaian kegiatan perencanaan, pengaturan, pengawasan, dan pengendalian lalu lintas untuk meningkatkan efisiensi dan keselamatan pengguna jalan.

Menurut Tamin (2016), manajemen lalu lintas dan angkutan jalan bertujuan untuk mengoptimalkan pengguna jaringan jalan yang ada melalui pengaturan arus lalu lintas, pengendalian kendaraan, serta penyediaan fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan alat pengawasan.

Dengan demikian, manajemen lalu lintas dan angkutan jalan dapat dipahami sebagai suatu sistem pengelolaan yang terintegrasi untuk mengatur pergerakan lalu lintas dan angkutan jalan guna mencapai kelancaran, keselamatan, dan ketertiban lalu lintas.

## **7. Sistem *One Way Traffic* (Sistem Satu Arah)**

Sistem *one way traffic* adalah salah satu bentuk manajemen lalu lintas yang mengatur pergerakan kendaraan hanya dalam satu arah pada ruas jalan tertentu. Menurut Khisty dan Lall (2017), sistem satu

arah bertujuan untuk mengurangi konflik lalu lintas dan meningkatkan kapasitas jalan.

Menurut Tamin (2016), penerapan sistem satu arah dapat meningkatkan kelancaran lalu lintas apabila didukung oleh perencanaan yang matang dan fasilitas yang memadai.

Selanjutnya, menurut Morlok (2018), keberhasilan sistem *one way traffic* sangat dipengaruhi oleh kejelasan rambu, kondisi marka jalan, serta tingkat kepatuhan pengguna jalan.

Dengan demikian, sistem *one way traffic* merupakan strategi pengaturan lalu lintas yang efektif apabila didukung oleh faktor teknis dan non-teknis yang memadai.

## **8. Model implementasi kebijakan**

### **a. Model Implementasi George C. Edward III**

Model implementasi kebijakan menurut George C. Edwards III dijelaskan oleh Widodo (2018) yang menyatakan bahwa terdapat empat variabel utama yang mempengaruhi keberhasilan implementasi kebijakan, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi.

#### **1) Komunikasi (*Communication*)**

Komunikasi merupakan proses penyampaian informasi kebijakan dari pembuat kebijakan kepada pelaksana dan kelompok sasaran. Menurut Widodo (2018), komunikasi yang efektif harus memenuhi tiga unsur utama, yaitu:

- a) Kejelasan, yaitu informasi yang disampaikan harus mudah dipahami.
- b) Konsistensi, yaitu informasi yang disampaikan tidak berubah-ubah.

2) Sumber Daya (*Resources*)

Sumber daya merupakan faktor yang sangat menentukan keberhasilan implementasi kebijakan. Menurut Widodo (2018) sumber daya meliputi:

- a) Sumber daya manusia, yaitu jumlah dan kompetensi pelaksana kebijakan.
- b) Sumber daya anggaran, yaitu ketersediaan dana untuk mendukung pelaksanaan.
- c) Sara dan prasarana, yaitu fasilitas pendukung seperti rambu lalu lintas, marka jalan, dan peralatan lainnya.

3) Disposisi (*Disposition*)

Disposisi atau sikap pelaksana merupakan sikap, komitmen, dan kesediaan pelaksana dalam menjalankan kebijakan. Menurut Widodo (2018), disposisi mencerminkan sejauh mana pelaksana menerima dan mendukung kebijakan yang telah ditetapkan.

- a) Komitmen pelaksana.
- b) Kejujuran dan integritas.
- c) Tingkat pemahaman terhadap kebijakan.

4) Struktur Birokrasi (*Bureaucratic Structure*)

Struktur birokrasi berkaitan dengan sistem organisasi yang mendukung pelaksana kebijakan. Menurut Widodo (2018), struktur birokrasi mencakup:

- a) Standar Operasional Prosedur (SOP).
- b) Pembagian tugas dan tanggung jawab.
- c) Koordinasi antar instansi.

b. Model Van Meter dan Van Horn

Menurut Van Meter dan Van Horn (dalam Subarsono, 2021), implementasi kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel, yaitu:

- 1) Standar dan tujuan kebijakan, merupakan kejelasan tujuan dan ukuran keberhasilan kebijakan.
- 2) Sumber daya, segala sumber yang mendukung pelaksanaan kebijakan
- 3) Karakteristik agen pelaksana, berkaitan dengan struktur dan kemampuan organisasi pelaksana.
- 4) Komunikasi antar organisasi, proses penyampaian informasi antara pihak yang terlibat.
- 5) Sikap Pelaksana, sikap dan komitmen pelaksana terhadap kebijakan.
- 6) Lingkungan ekonomi, sosial, dan politik, kondisi eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

### c. Model Mazmanian dan Sabatier

Menurut Mazmanian dan Sabatier (dalam Winarno, 2016), implemen kebijakan dipengaruhi oleh beberapa variabel yaitu:

- 1) Karakteristik Masalah, berkaitan dengan tingkat kesulitan masalah yang dihadapi dalam implementasi kebijakan.
- 2) Karakteristik kebijakan, berkaitan dengan kemampuan kebijakan dalam mengatur pelaksanaan di lapangan.
- 3) Lingkungan kebijakan, berkaitan dengan faktor eksternal yang mempengaruhi implementasi kebijakan.

### C. Kerangka Pemikiran

Implementasi kebijakan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang sistem pengelolaan rambu-rambu lalu lintas (Sipalui Raja Adat) dalam penerapan sistem satu arah (*one way traffic*) di Jalan Antasari Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara merupakan upaya pemerintah daerah dalam menciptakan ketertiban, kelancaran, dan keselamatan lalu lintas.

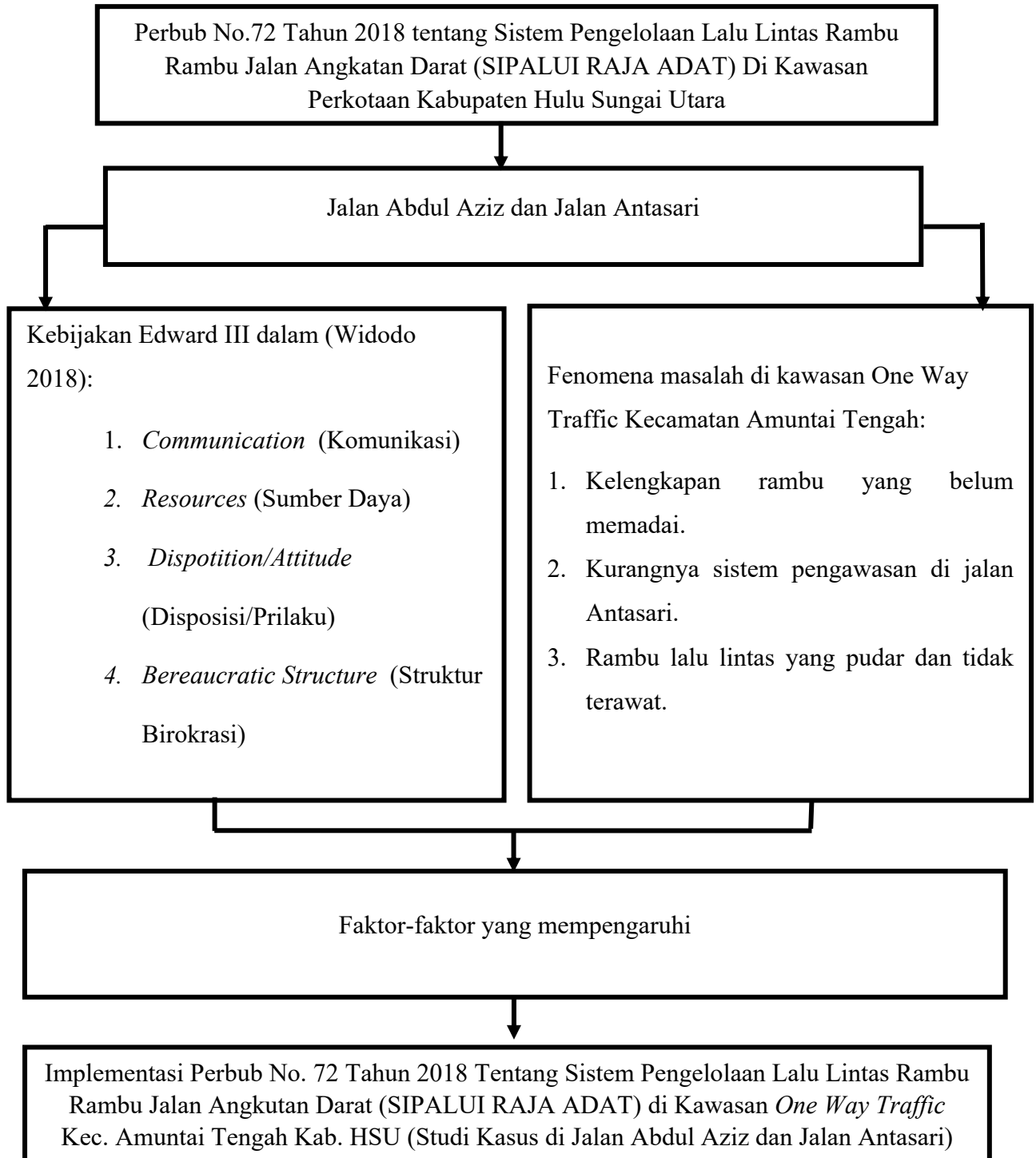
Dalam perspektif administrasi publik, keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh berbagai faktor sebagaimana dikemukakan oleh teori implementasi kebijakan. Faktor tersebut meliputi kemampuan pemerintah dalam mengkomunikasikan kebijakan, menyediakan sumber daya, serta melakukan pengawasan dan penegakan hukum.

Dalam penelitian ini, penulis akan mendeskripsikan fenomena-fenomena yang berkaitan dengan Implementasi Kebijakan implementasi kebijakan dilihat dari beberapa aspek utama yang berkaitan langsung dengan fenomena yang terjadi di lapangan, yaitu:

Dengan demikian, kerangka pemikiran dalam penelitian ini menekankan bahwa keberhasilan implementasi Perbub No. 72 Tahun 2018 Tentang Sistem Satu Arah (*one way traffic*) Di Ruas Jalan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara yang mana di dalamnya akan menjelaskan pengimplemntasian Perbub di kawasan perkotaan kabupaten Hulu Sungai Utara masih di hadapkan dengan permasalahan khususnya di jalan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah berkaitan dengan bebrapa permasalahan tersebut penulis merujuk merujuk pendapat menurut Widodo (2018). Untuk lebih jelasnya dapat dilihat pada gambar 2.1 kerangka pemikiran berikut ini:

Gambar 2. 1

## Kerangka Pemikiran



Sumber: Peneliti, 2026

### **BAB III**

#### **METODE PENELITIAN**

##### **A. Lokasi Penelitian**

Penelitian ini dilaksanakan di jalan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara. Pemilihan lokasi ini didasarkan pada pertimbangan bahwa di ruas jalan tersebut merupakan salah satu jalan yang menerapkan *sistem one way traffic* berdasarkan Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 tentang Sistem Pengelolaan Lalu Lintas Rambu Rambu Jalan Angkutan Darat (SIPALUI RAJA ADAT) Di Wilayah Perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

Lokasi ini memiliki tingkat aktivitas lalu lintas yang cukup tinggi, sehingga menjadi lokasi yang relevan untuk mengkaji implementasi kebijakan sitem satu arah. Dilokasi ini juga masih ditemukan berbagai permasalahan, seperti ketidaklengkapan rambu lalu lintas, kondisi rambu yang kurang terawat, serta belum konsistennya penerapan sistem *one way traffic* di lapangan.

Dengan demikian, lokasi ini dipilih karena dianggap mampu memberikan data dan informasi yang sesuai dengan fokus penelitian mengenai implementasi kebijakan sistem *one way traffic* di kawasan perkotaan Kabupaten Hulu Sungai Utara.

## **B. Pendekatan Penelitian**

Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif, menurut Brewer dan Hunter (dalam Adhi Kusumastuti & Ahmad Mustamil Khoirun, 2019:4) Penelitian kualitatif secara inheren merupakan fokus perhatian dengan beragam metode-metode. Perlu disadari bahwa penggunaan metode yang beragam atau triangulasi mencerminkan upaya untuk memperoleh pemahaman yang mendalam mengenai suatu fenomena yang sedang dikaji.

Menurut Sugiyono dalam Harbani Pasalong (2016:161), pendekatan kualitatif merupakan metode penelitian yang digunakan untuk meneliti pada kondisi objek yang alamiah, di mana peneliti berperan sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi, serta analisis data bersifat induktif. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk menggali informasi secara mendalam terkait perilaku, persepsi, dan pengalaman subjek penelitian.

Pendekatan kualitatif diharapkan mampu memberikan gambaran yang mendalam dan menyeluruh mengenai implementasi kebijakan yang diteliti, sehingga hasil penelitian dapat digunakan sebagai bahan evaluasi dan rekomendasi bagi pihak terkait.

### C. Tipe Penelitian

Penelitian ini memiliki suatu proses yang diawali dengan minat yang ada dalam diri seseorang dalam mendapatkan pemahaman terhadap fenomena tertentu yang kemudian meningkat menjadi ide, teori, dan konsep. Tipe penelitian ini berguna untuk menjawab permasalahan yang diangkat dalam suatu penelitian.

Tipe penelitian yang digunakan dalam penelitian Implementasi Peraturan Bupati Nomor 72 Tahun 2018 Tentang Siste *one way traffic* Di Ruas Jalan Antasari Kecamatan Amuntai Tengah Kabupaten Hulu Sungai Utara ini adalah tipe penelitian deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian deskriptif bertujuan untuk menggambarkan secara sistematis, faktual, dan akurat mengenai fenomena atau kondisi yang terjadi di lapangan.

### D. Data dan Sumber Data

#### 1. Data

Data dalam penelitian pada dasarnya terdiri dari semua informasi atau bahan yang disediakan alam (dalam arti luas) yang harus dicari, dikumpulkan dan dipilih oleh peneliti. Data bisa terdapat pada segala sesuatu apa pun yang menjadi bidang dan sasaran penelitian. Dalam teknik ini, maka penulis menggunakan teknik pengumpulan data dengan dua cara yakni:

a. Data Primer

Data primer merupakan data yang diperoleh secara langsung dari sumber pertama di lapangan melalui proses pengumpulan data oleh peneliti. Data primer dalam penelitian ini diperoleh melalui observasi dan wawancara dengan informan yang dianggap mengetahui dan memahami permasalahan yang diteliti.

b. Data Sekunder

Data sekunder merupakan data yang diperoleh dari sumber tidak langsung atau melalui dokumen yang telah tersedia. Data ini digunakan untuk mendukung dan melengkapi data primer.

2. Sumber Data

Sumber data pada penelitian ini, sesuai dengan teknik penarikan sumber data utama sebagai informan dengan menggunakan teknik penarikan sumber data yaitu Purposive Sampling adalah cara memilih informan didasarkan pada informasi yang tersedia serta sesuai dengan penelitian yang sudah berjalan sehingga perwakilannya terhadap populasi dapat di pertanggungjawabkan. Jadi, sumber data merupakan informasi yang diperoleh oleh peneliti untuk menjawab pertanyaan dalam penelitian. Peneliti menggunakan penelaian sendiri dalam memilih informan. Teknik ini dipilih atas dasar supaya data yang diperoleh adalah data yang akurat karena informan merupakan sumber data yang tepat dipilih oleh peneliti.

**Tabel 3. 1**  
**Informan Penelitian**

| No     | Jabatan                                                       | Jumlah   |
|--------|---------------------------------------------------------------|----------|
| 1      | Kepala Dinas Perhubungan Kabupaten Hulu Sungai Utara          | 1 Orang  |
| 2      | Kepala Bidang Lalu Lintas Dinas Perhubungan                   | 1 Orang  |
| 3      | Petugas Lapangan/Dishub yang menangani pengaturan lalu lintas | 1 Orang  |
| 4      | Petugas pemeliharaan perlengkapan jalan                       | 1 Orang  |
| 5      | Petugas pengatur arus lalu lintas di jalan Abdul Aziz         | 1 orang  |
| 6      | Pengguna jalan                                                | 3 orang  |
| 7      | Pedagang atau masyarakat sekitar Jalan                        | 3 Orang  |
| 8      | Warga yang sering melintas di lokasi penelitian               | 2 Orang  |
| Jumlah |                                                               | 13 Orang |

*Sumber: Peneliti, 2026*

#### **E. Desain Operasional Penelitian**

Desain operasional penelitian merupakan penjabaran konsep dan teori yang digunakan dalam penelitian ke dalam indikator dan sub-variabel yang dapat diamati di lapangan. Desain operasional bertujuan untuk

memudahkan peneliti dalam mengumpulkan data serta menjaga konsistensi antara teori dan fokus penelitian.

Penelitian ini menggunakan teori implementasi kebijakan dari George C. Edwards III dalam Widodo (2018), yang menyatakan bahwa keberhasilan implementasi kebijakan dipengaruhi oleh empat variabel utama, yaitu komunikasi, sumber daya, disposisi, dan struktur birokrasi. Desain operasional penelitian dapat peneliti sajikan dalam bentuk tabel, sebagai berikut :

**Tabel 3. 2**  
**Desain Operasional Penelitian**

| Variabel                                                | Sub Variabel                                           | Indikator                                                                                                      |
|---------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| Implementasi kebijakan Edwards III (dalam Widodo, 2018) | <i>Communication</i><br>(Komunikasi)                   | a. Kejelasan Informasi<br>b. Konsistensi                                                                       |
|                                                         | <i>Resourches</i><br>(Sumber Daya)                     | a. Sumber Daya Manusia<br>b. Sumbr Daya Anggaran<br>c. Fasilitas                                               |
|                                                         | <i>Dispositions</i><br>(Disposisi/sikap pelaksana)     | a. Komitmen<br>b. Kejujuran                                                                                    |
|                                                         | <i>Bureaucractic Structure</i><br>(Struktur Birokrasi) | a. SOP (Standard Operating Procedure)<br>b. Kejelasan SOP pelaksana<br>c. Koordinasi Antar Pelaksana Kebijakan |

*Sumber: Peneliti, 2026*

## **F. Teknik Pengumpulan Data**

Teknik pengumpulan data dalam penelitian ini menggunakan beberapa metode yang disesuaikan dengan pendekatan penelitian kualitatif deskriptif. Teknik yang digunakan bertujuan untuk memperoleh data yang mendalam dan komprehensif terkait implementasi kebijakan SIPALUI RAJA ADAT di ruas jalan Antasari Kecamatan Amuntai Utara Kabupaten Hulu sungai Utara. Maka Teknik pengambilan data yang digunakan dalam penelitian sebagai berikut:

1. Observasi, batasan pengertian atau definisi observasi menurut Sugiyono (2017), adalah teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara mengamati secara langsung kondisi di lapangan.
2. Wawancara, menurut Moleong (2017) yaitu percakapan dengan maksud tertentu yang dilakukan oleh dua pihak, yaitu pewawancara dan narasumber.
3. Dokumentasi, Menurut Sugiyono (2017) yaitu teknik pengumpulan data dengan cara mengumpulkan dokumen, arsip, foto, atau catatan yang berkaitan dengan penelitian.

## **G. Teknik Analisa Data**

Menurut Miles dan Huberman ( Lasiyono & Alam, 2024:122) terdapat 3 teknik Analisis data kualitatif, yaitu reduksi data, penyajian data, dan penarikan kesimpulan.

### 1. Reduksi Data

Reduksi data adalah proses pemilihan, pemusatan perhatian, penyederhanaan, serta transformasi data mentah yang diperoleh dari hasil wawancara, observasi, dan dokumentasi. Dalam penelitian ini, reduksi data dilakukan dengan cara Menyeleksi data yang relevan dengan fokus penelitian, mengelompokkan data berdasarkan variabel teori Edwards III, kemudian mengelompokkan data berdasarkan fenomena masalah.

### 2. Penyajian Data

Penyajian data dilakukan dalam bentuk uraian naratif deskriptif yang sistematis, sehingga memudahkan peneliti dalam memahami pola hubungan antar data.

### 3. Penarikan Kesimpulan

Penarikan kesimpulan adalah penarikan berdasarkan pola, hubungan, dan kecenderungan yang ditemukan dalam data. Verifikasi dilakukan secara terus-menerus selama proses penelitian untuk memastikan bahwa kesimpulan yang diambil benar-benar didukung oleh data yang valid.

## H. Uji Kredibilitas Data

Dalam rangka mengupayakan keabsahan data, maka dibuat uji kredibilitas data sebagaimana di simpulkan Sugiyono (2017:252-260) antara lain :

### 1. Perpanjangan Pengamatan

Perpanjangan pengamatan berarti peneliti kembali ke lapangan, melakukan pengamatan dan wawancara dengan sumber data yang pernah ditemui maupun sumber data yang baru. Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan keakraban (tidak ada jarak lagi, semakin terbuka, saling mempercayai) antara peneliti dan narasumber sehingga tidak ada informasi yang disembunyikan lagi. Selain itu perpanjangan pengamatan ini dilakukan untuk mengecek kembali apakah data yang telah diberikan oleh sumber data selama ini merupakan data yang sudah benar atau tidak. Bila sudah dicek kembali ke lapangan data sudah benar berarti kredibel, maka waktu perpanjang pengamatan dapat diakhiri

### 2. Meningkatkan Ketekunan

Meningkatkan ketekunan berarti melakukan pengamatan secara lebih cermat dan berkeseimbangan, dengan cara tersebut maka kepastian data dan urutan peristiwa akan dapat direkam secara pasti dan sistematis. Selain itu, penelitian dapat melakukan pengecekan kembali apakah data yang telah ditemukan itu salah atau tidak. Penelitian memberikan dapat memberikan diskripsi data yang akurat dan sistematis dan dapat diamati.

### 3. Triangulasi

Triangulasi dalam pengujian kredibilitas ini diartikan sebagai pengecekan data dari berbagai sumber dengan berbagai cara dan berbagai waktu. Terdapat triangulasi sumber, triangulasi teknik

pengumpulan data, waktu. Triangulasi sumber dilakukan dengan cara mengecek data yang telah diperoleh melalui dengan beberapa sumber, triangulasi teknik dilakukan dengan cara mengecek data kepada sumber yang sama dengan teknik yang berbeda, dan triangulasi waktu dilakukan dengan cara melakukan pengecekan dengan wawancara, observasi, dokumentasi dan dengan teknik lain dalam waktu atau situasi yang berbeda.

## DAFTAR PUSTAKA

- Agustino, Leo. (2020). *Dasar-Dasar Kebijakan Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Asshiddiqie, Jimly. (2017). *Pengantar Ilmu Hukum Tata Negara*. Jakarta: Rajawali Pers.
- Indriani, & Habibie. (2025). Implementasi Kebijakan Rekayasa Lalu Lintas: Studi Kasus Sistem Satu Arah dan U-Turn di Kota Pekanbaru. *International Journal of Social Science and Education (IJOSSE)*.
- Khisty, C. J., & Lall, B. K. (2017). *Transportation Engineering: An Introduction*. Jakarta: Erlangga.
- Kusumastuti, Adhi, & Khoirun, Ahmad Mustamil. (2019). *Metode Penelitian Kualitatif*. Semarang: Lembaga Pendidikan Sukarno Pressindo.
- Miro, Fidel. (2018). *Perencanaan Transportasi untuk Mahasiswa, Perencana dan Praktisi*. Jakarta: Erlangga.
- Moleong, Lexy J. (2017). *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Morlok, Edward K. (2018). *Pengantar Teknik dan Perencanaan Transportasi*. Jakarta: Erlangga.
- Nugroho, Riant. (2017). *Public Policy*. Jakarta: PT Elex Media Komputindo.
- Pasalong, Harbani. (2016). *Metode Penelitian Administrasi Publik*. Bandung: Alfabeta.
- Putra, Ikhsan Risniawan, Yuliani, & As'ari. (2022). Implementasi Kebijakan Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. *Jurnal Niara*.
- Subarsono, AG. (2019). *Analisis Kebijakan Publik: Konsep, Teori dan Aplikasi*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Sugiyono. (2017). *Metode Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, dan R&D*. Bandung: Alfabeta.
- Tamin, Ofyar Z. (2016). *Perencanaan dan Permodelan Transportasi*. Bandung: ITB.
- Wahab, Solichin Abdul. (2018). *Analisis Kebijakan: Dari Formulasi ke Implementasi Kebijakan Negara*. Jakarta: Bumi Aksara.
- Warpani, Suwardjoko. (2017). *Pengelolaan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan*. Bandung: ITB.

Widodo, Joko. (2018). Analisis Kebijakan Publik: Konsep dan Aplikasi Analisis Proses Kebijakan Publik. Malang: Bayumedia.

Winarno, Budi. (2016). Kebijakan Publik: Teori, Proses, dan Studi Kasus. Yogyakarta: CAPS